

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Perda Kabupaten Majalengka Nomor 8 tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2025; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk melakukan perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Ekonomi kreatif merupakan pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju.

Kabupaten Majalengka adalah wilayah yang memiliki sumber daya yang berlimpah, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumberdaya keterampilan dan teknologi. Wilayah ini berpotensi untuk mengembangkan sarana industri kreatif karena terdiri dari sub sektor industri kreatif salah satunya industri seni pertunjukan. Sentra industri seni pertunjukan, merupakan salah satu industri kreatif yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka. Jenis seni pertunjukkan

yang dimiliki pun beragam seperti Sandiwara Sunda, Wayang Kulit Purwa, Wayang Golek, Pantun Sunda, Gaok, Ujungan dan Sampyong, Sintren, Reog, Gembyung, Debus, Kuda Renggong, Debus, Seni Tari, Degung dan Kiliningan, Calung dan Kecapian. Seni sendiri tidak dapat dipungkiri memberi banyak motivasi inspirasi kepada manusia dan segenap aspek kehidupannya. Seniman Majalengka pun tersebar di beberapa daerah, dan bergabung dalam beragam komunitas seperti Gaya Remaja, Mekar Budaya, Putra Remaja, Ringgit Purwa, Panggelar Budi, Panca Darma, Sri Sejati, Lurgeta, Simbar Kencana, Giri Cempaka dan Rampak Keramik. Pada tahun 2018 lalu, Kabupaten Majalengka mengusung subsektor seni pertunjukan sebagai program unggulannya. Kemudian pada 2019, daerah ini berhasil mendapatkan predikat Kabupaten Kreatif Indonesia di bidang seni pertunjukan.

Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, organisasi atau institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi biasa digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut.

Collaborative Governance dapat diartikan sebagai salah satu dari bentuk *governance*. Konsep ini mengartikan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama melalui cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis

atau perusahaan bukanlah sesuatu yang dapat terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan harus bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Valentine Siagian, dalam buku *Ekonomi dan Bisnis Indonesia (2020)*, ekonomi kreatif merupakan proses penciptaan, kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa, yang dalam prosesnya membutuhkan kreativitas dan kemampuan intelektual. Jadi, Ekonomi kreatif merupakan era ekonomi baru yang mengintensifikasi informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.

Ratner and Smith (2012) dalam buku *Practitioner's reflections: Making a difference in high corruption and weak governance environments*. Membawa semua pemangku kepentingan utama ke dalam proses memastikan hal itu berbagai perspektif akan terwakili, dipastikan aktor lokal memiliki kesempatan untuk mempengaruhi pemahaman satu sama lain, dan akhirnya membangun komitmen untuk bertindak tidak mungkin melalui analisis orang luar saja. Prinsip-prinsip yang mendasari pendekatan ini diambil dari proses yang dikenal sebagai "Berkolaborasi untuk Ketahanan" atau CORE.

Alamsyah (2023) dalam buku *Deliberation and Decision in Collaborative Governance: A Simulation of Approaches to Mitigate Power Imbalance*. Konsep *Collaborative Governance* merupakan strategi baru dalam struktur *governance* yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan atau pejabat pemerintah membuat keputusan bersama yang dirumuskan dalam sebuah forum (Ansell & Gashl, 2008; Choi & Robertson, 2014).

Pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan suatu proses pengembangan ekonomi kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Majalengka pada potensi ekonomi yang kreatif. Dan berguna bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Majalengka.

Ariesmansyah (2023) *Collaborative* menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakukan pihak tertentu, berdasarkan kamus Heritage Amerika (2000), *Collaborative* mampu bekerja bersama khususnya dalam usaha penggabungan dalam usaha penggabungan pemikiran Gray (1989) menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berpikir beberapa pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan.

Organisasi masyarakat dan aparatur desa memiliki suatu hubungan timbal balik yang akan saling menguntungkan dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat menjadi lebih kreatif. Hal ini sesuai prinsip-prinsip dasar dalam pembangunan ekonomi lebih kreatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan sumber Daya Buatan secara budaya guna dan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Dinas Pariwisata dan Budaya (DISPARBUD) merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan daerah dibidang Pariwisata dan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebudayaan. Disparbud dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan Bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Disparbud mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Mencermati permasalahan yang terdapat dalam pengembangan ekonomi kreatif banyak tantangan yang muncul ketika peneliti melakukan penelitian di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Majalengka diantaranya:

1. Identifikasi Hambatan dan Peluang (Fase Mendengarkan)

Hambatan ekonomi kreatif menjadi dasar para pelaku ekonomi yang semakin sulit dalam melakukan pemasaran produknya untuk menjangkau daya saingan yang lebih tinggi. Keberhasilan dari sektor ekonomi kreatif ini memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa bersaing di pasar internasional. Perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka mengalami beberapa kendala. Beberapa kendala tersebut antara lain:

- a. Rendahnya ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang permainan interaktif, seni pertunjukan dan arsitektur.
- b. Selain itu masih terdapat *subsector* dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang relative masih rendah, hal ini dapat disebabkan nilai jual di dalam negeri untuk produk kerajinan yang rendah, waktu pengerjaan lama dan biaya produksi yang tinggi karena memprioritaskan pengerjaan padat karya.
- c. Kelemahan lain yang terdapat di industri kreatif adalah secara umum, aktivitas perusahaan yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena usaha kreatif yang sebagian besar adalah usaha kecil mudah untuk

keluar masuk industry, dengan mengubah usaha apabila produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan selera pasar.

2. Strategi Debat (Fase Dialog)

Proses dialog yang dilakukan pemerintah dengan pihak masyarakat atau pun swasta tidak berjalan secara efektif. Karena gagalnya proses interaksi antara berbagai faktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau individu masyarakat. Selain itu juga adanya kurang kepercayaan terhadap pemerintah sehingga sektor-sektor yang berkolaborasi masih terhambat. Permasalahan lainnya seperti:

- a. Pelaku Ekonomi Kreatif mengalami kekurangan dalam aspek keuangan dan permodalan.
- b. Pelaku Ekonomi Kreatif mengalami kendala kekurangan dalam aspek Sumber SDM dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan pendampingan dalam dukungan teknis dalam bentuk pemasaran.
- c. Pelaku Ekonomi Kreatif kekurangan dalam aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Berdasarkan Permasalahan di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian yang Berjudul ***“Collaborative Governance Assessment Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Majalengka”*** dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Majalengka.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata dan Budaya kabupaten Majalengka, sebagai responden atau informan dalam penelitian ini adalah kantor dinas Pariwisata dan Budaya (DISPARBUD). Penelitian ini akan difokuskan pada “*Collaborative Governance Assessment* Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Majalengka” yang objek utamanya merupakan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Majalengka.

Fokus penelitian menurut Teori Ratner (2012) indikator Proses *Collaborative Governance Assesment*:

1. *Identifying Obstacles and Opportunities* / Identifikasi Hambatan dan Peluang (Fase Mendengarkan)
2. *Debating Strategies For Influence* / Strategi Debat Untuk Mempengaruhi (Fase Dialog)
3. *Planning Collaborative Actions* / Penyusunan Rencana Kolaboratif (Fase Pilihan)

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Collaborative Governance Assessment* Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Majalengka?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan yang ditemukan di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Majalengka dalam melakukan *Collaborative Governance Assessment* Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Majalengka?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan masalah yang di bahas. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Collaborative Governance Assessment* Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Majalengka
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Majalengka dalam melakukan *Collaborative Governance Assessment* Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Majalengka

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis tetapi juga memiliki kegunaan yang bersifat praktis. Kegunaan yang diharapkan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber pengetahuan, serta wawasan dalam menerapkan teori-teori selama perkuliahan Administrasi Publik dan mengembangkan wawasan mengenai *Collaborative Governance Assessment*.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan pemikiran mengenai masalah-masalah yang dihadapi

oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Majalengka khususnya berkaitan dengan *Collaborative Governance Assessment* Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.